

JUJURAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA SAMARINDA DARI PRASYARAT MENIKAH KE STATUS SOSIAL

Risda Fitriyanti¹, Muhammad Arifin²

Abstrak

Tradisi jujuran dalam masyarakat Banjar di Kota Samarinda memiliki kedudukan penting sebagai syarat adat dalam prosesi pernikahan. Jujuran umumnya diberikan dalam bentuk uang dan barang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan dipahami memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai unsur mendasar dalam struktur perkawinan adat yang mencerminkan nilai-nilai tradisional. Kedua, secara fungsional, jujuran digunakan untuk membantu pembiayaan pesta pernikahan serta kebutuhan awal rumah tangga. Ketiga, jujuran menjadi simbol kehormatan dan wibawa keluarga perempuan, dengan catatan bahwa jumlah yang diberikan sesuai ekspektasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberian jujuran dalam adat pernikahan masyarakat Banjar serta menganalisis keterkaitan antara status sosial dan besaran jujuran. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran masih dijalankan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial yang kuat. Penentuan nilai jujuran dipengaruhi oleh status sosial keluarga perempuan, meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, serta latar belakang keluarga. Musyawarah dalam proses badatang lebih banyak melibatkan keluarga inti, sementara calon mempelai cenderung tidak dilibatkan secara langsung. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jujuran berperan sebagai instrumen sosial untuk menjaga kehormatan dan keseimbangan status antar keluarga dalam masyarakat Banjar.

Kata Kunci : Jujuran, Prasyarat, Status sosial.

Pendahuluan

Status sosial merupakan salah satu pilar utama dalam struktur masyarakat yang menggambarkan kedudukan individu dalam hubungan sosial. Linton (dalam Gunawan, 2000) menyatakan bahwa status dapat diartikan sebagai posisi dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: risdafr@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

suatu pola sosial tertentu dan sebagai himpunan hak serta kewajiban yang tidak tergantung pada individu tertentu. Status ini memengaruhi peran serta cara seseorang berinteraksi dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2009), status sosial menunjukkan kedudukan individu dalam masyarakat berdasarkan lingkungan sosial, prestise, serta hak dan kewajibannya. Ia membedakan status menjadi dua jenis, yaitu *ascribed status* yang diperoleh sejak lahir seperti jenis kelamin dan keturunan dan *achieved status* yang dicapai melalui usaha seperti pendidikan dan pekerjaan (Soekanto, 2010).

Di tengah keragaman budaya etnis di Indonesia, masing-masing kelompok memiliki adat istiadat yang unik dalam menentukan syarat dan prosesi pernikahan. Salah satu kelompok etnis yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional tersebut adalah suku Banjar yang mayoritas bermukim di Kalimantan. Masyarakat Banjar dikenal sebagai kelompok etnis yang masih menjaga adat perkawinan secara ketat, di mana prosesi dan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Ahmadi Hasan (2020) mencatat bahwa masyarakat Banjar merupakan bagian dari kelompok Melayu Muda yang mendiami pesisir Kalimantan Selatan dan beragama Islam, menjadikan unsur adat dan agama sangat kuat dalam tradisi pernikahan mereka. Alfani Daud (1997) menegaskan bahwa pernikahan dalam masyarakat Banjar merupakan ritus sakral yang mengikat dua keluarga besar. Setiap prosesnya, seperti basusuluh, batakun, badatang, hingga maantar jujuran, memiliki makna sosial dan simbolik yang mendalam. Proses ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga dan mempertahankan struktur sosial yang ada.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adat Banjar adalah tradisi jujuran, yaitu pemberian berupa uang dan barang dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Jujuran tidak hanya dipandang sebagai bentuk kesanggupan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, bahkan politik lokal. Tradisi jujuran menunjukkan keterkaitan yang erat dengan status sosial. Keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat cenderung menetapkan jumlah jujuran yang lebih besar, yang sekaligus mencerminkan prestise mereka. Rifqi Akbari (2018) menyatakan bahwa faktor seperti pendidikan, kecantikan, dan keturunan calon mempelai perempuan sangat memengaruhi nilai jujuran.

Dalam praktiknya, proses negosiasi jujuran dilakukan secara musyawarah antara keluarga kedua belah pihak. Masyarakat Banjar mengenal istilah “badatang” sebagai tahap lamaran yang melibatkan diskusi terbuka mengenai nilai jujuran dan tanggal pernikahan. Tahapan ini menjadi arena kompromi antara kehormatan keluarga perempuan dan kemampuan ekonomi keluarga laki-laki.

Dinamika sosial seperti ini menunjukkan bahwa jujuran tidak sekadar ritual adat, melainkan juga alat sosial untuk menjaga kesetaraan status di masyarakat. Semakin tinggi nilai jujuran, semakin tinggi pula kehormatan keluarga perempuan di mata publik. Di sisi lain, kegagalan dalam memenuhi

jujuran dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan atau ketidakmampuan yang berdampak pada reputasi sosial. Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Samarinda, praktik jujuran masih tetap dijalankan, meskipun terdapat adaptasi terhadap perkembangan zaman. Tradisi ini tetap dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur dan sarana memperkuat solidaritas sosial antar keluarga besar.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jujuran dijalankan dalam masyarakat Banjar di Kota Samarinda serta bagaimana status sosial mempengaruhi nilai dan praktik jujuran tersebut. Kajian ini penting untuk mengungkap keterkaitan antara budaya lokal dan struktur sosial dalam masyarakat multikultural modern.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar

Jujuran merupakan bagian penting dalam adat pernikahan masyarakat Banjar, yang secara umum dimaknai sebagai pemberian berupa uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujuran diartikan sebagai bagi hasil secara ikhlas atas usaha kerja sama. Sedangkan menurut Sanawiah dan Rismanto (2021), jujuran adalah pemberian yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Alfani Daud (2014) menyebut jujuran sebagai besar kecilnya maskawin yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam tradisi adat Banjar.

Penting untuk membedakan antara jujuran dan mahar dalam konteks pernikahan masyarakat Banjar. Mahar merupakan syarat wajib dalam pernikahan Islam yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari rukun akad nikah. Jujuran, sebaliknya, adalah syarat adat yang disepakati oleh kedua keluarga dan biasanya diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Jujuran bersifat simbolik dan sosial, sedangkan mahar bersifat religius dan individual. Dalam praktiknya, jumlah jujuran sering kali lebih besar daripada mahar, karena juga mencakup biaya pesta dan perlengkapan pengantin (Hanifah et al., 2023).

Secara fungsional, jujuran memiliki banyak makna dalam masyarakat Banjar. Selain sebagai kontribusi terhadap biaya pesta pernikahan, jujuran juga dipandang sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga mempelai perempuan. Jujuran digunakan untuk menunjukkan keseriusan, tanggung jawab, serta kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Dalam masyarakat Banjar, hal ini bahkan dapat mempererat hubungan antar keluarga dan memperkuat posisi sosial mereka di hadapan masyarakat (Akbari, 2018).

Besaran nilai jujuran dalam masyarakat Banjar tidak bersifat tetap, melainkan sangat bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor utama yang menentukan jumlah jujuran adalah status sosial orang tua mempelai perempuan, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta kecantikan calon pengantin. Semakin tinggi status sosial dan pencapaian calon mempelai perempuan, maka semakin tinggi pula nilai jujuran yang diharapkan (Rifqi, 2018). Selain itu, kondisi ekonomi

keluarga dan harga kebutuhan pokok juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah yang layak.

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam, tradisi jujuran tetap memperoleh legitimasi dalam konteks hukum adat dan fiqh lokal. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah al-'adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat yang berlaku dan diterima masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, meskipun jujuran bukan rukun atau syarat sah pernikahan secara agama, namun praktik ini tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar (Madaniah, 2021).

Konsep Status Sosial dalam Masyarakat

Status sosial merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu kelompok sosial, yang berpengaruh terhadap hak, kewajiban, dan perlakuan yang diterimanya dari masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, status mencerminkan identitas sosial yang menempatkan individu dalam tatanan struktur masyarakat tertentu. Menurut Linton (dalam Gunawan, 2000), status memiliki dua pengertian utama: pertama, sebagai posisi dalam pola sosial yang berlaku; dan kedua, sebagai seperangkat hak serta kewajiban yang melekat pada posisi tersebut, tanpa melihat siapa yang memegangnya.

Soekanto (2009) mengemukakan bahwa status sosial merupakan penanda umum posisi seseorang dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Penempatan ini bisa ditentukan oleh faktor lingkungan, prestise, serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Dalam klasifikasinya, Soekanto (2010) membagi status sosial menjadi dua jenis utama, yaitu *ascribed status* dan *achieved status*. *Ascribed status* adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, atau keturunan. Sementara itu, *achieved status* merupakan posisi sosial yang dicapai melalui usaha dan prestasi, seperti pendidikan dan jabatan profesional.

Dalam masyarakat tradisional seperti suku Banjar, konsep status sosial masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pernikahan. Seorang individu yang berasal dari keluarga terpandang atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih dihormati, dan status ini akan memengaruhi cara masyarakat memandangnya. Bahkan, status tersebut dapat menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan adat, termasuk dalam menentukan besaran jujuran pernikahan.

Dengan demikian, status sosial tidak hanya mencerminkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi dan ekspektasi masyarakat. Dalam tradisi Banjar, status ini menjadi salah satu indikator yang digunakan keluarga dalam menilai kelayakan pasangan calon mempelai dan menentukan syarat-syarat pernikahan, termasuk nilai jujuran yang dianggap pantas. Pemahaman tentang status sosial sangat penting untuk

Jujuran di Samarinda dari Prasyarat Menikah ke Status Sosial (Risda Fitriyanti)
mengungkap bagaimana struktur sosial lokal memengaruhi praktik adat dalam masyarakat.

Keterkaitan Jujuran dan Status Sosial dalam Tradisi Banjar

Dalam masyarakat Banjar, tradisi jujuran tidak sekadar dipandang sebagai pemberian dalam prosesi pernikahan, melainkan mencerminkan simbol status sosial. Jujuran menjadi indikator penting untuk menilai kedudukan keluarga mempelai perempuan, sekaligus menjadi sarana menjaga kehormatan keluarga di hadapan masyarakat. Besaran jujuran ditentukan bukan hanya berdasarkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi juga oleh ekspektasi sosial terhadap keluarga perempuan yang dikaitkan dengan prestise, garis keturunan, dan tingkat pendidikan.

Secara sosiologis, jujuran merefleksikan nilai ascribed maupun achieved status. Jika seorang perempuan berasal dari keluarga terpandang (*ascribed*), maka jujuran yang diminta umumnya tinggi. Namun, faktor seperti pendidikan tinggi dan pekerjaan bergengsi juga menjadi alasan meningkatnya nilai jujuran, sebagai bentuk pengakuan terhadap pencapaian personal (*achieved*) dari calon mempelai perempuan. Dengan demikian, status sosial bukan hanya bawaan lahir, tetapi juga dibentuk oleh usaha individual dan dipertimbangkan dalam negosiasi jujuran (Rifqi, 2018).

Proses musyawarah atau perundingan yang dikenal dengan istilah badatang menjadi tahapan penting dalam menetapkan nilai jujuran. Dalam prosesi ini, pihak keluarga perempuan menyampaikan permintaan jujuran beserta perlengkapan mempelai, yang akan ditanggapi oleh pihak laki-laki sesuai kemampuannya. Negosiasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keharmonisan sosial dan kesetaraan simbolik antara dua keluarga (Akbari, 2018).

Lebih jauh, jumlah jujuran yang besar dapat menjadi alat legitimasi status sosial. Masyarakat Banjar memandang tinggi keluarga yang mampu menggelar pesta besar dengan jujuran yang “diaduk” di depan tamu, karena hal tersebut dianggap menunjukkan keberhasilan dan kehormatan. Sebaliknya, jujuran yang terlalu kecil dapat menimbulkan persepsi negatif, bahkan dapat dianggap merendahkan keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian nilai jujuran menjadi pemicu batalnya pertunangan, karena dianggap melanggar tatanan adat dan mencoreng harga diri keluarga (Hanifah et al., 2023). Oleh karena itu, pernikahan dalam adat Banjar tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ajang pernyataan identitas sosial dan simbol keberadaan sosial keluarga besar kedua belah pihak (Madaniah, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik jujuran dalam masyarakat Banjar di Kota Samarinda dan bagaimana keterkaitannya dengan status sosial. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial

dan budaya secara holistik, terutama dalam konteks tradisi yang masih dijalankan secara turun-temurun. Fokus penelitian ini adalah pada dua aspek, yaitu proses pemberian jujuran dalam adat perkawinan masyarakat Banjar serta hubungan antara status sosial keluarga dengan besar kecilnya jujuran yang diberikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat yang pernah menjalankan pernikahan adat Banjar. Observasi dilakukan secara partisipatif, dengan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan prosesi pernikahan adat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui catatan tertulis, arsip, dan foto kegiatan adat. Informan dipilih secara purposif, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait tema penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas data dan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Lokasi penelitian dipilih di Kota Samarinda karena kota ini merupakan salah satu wilayah dengan populasi masyarakat Banjar yang cukup besar dan masih aktif menjalankan tradisi adat, termasuk praktik jujuran dalam pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai hubungan antara tradisi jujuran dan status sosial dalam kehidupan masyarakat Banjar kontemporer.

Hasil Penelitian

Proses Pemberian Jujuran dalam Adat Banjar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran masih dijalankan secara aktif oleh masyarakat Banjar di Kota Samarinda dalam setiap prosesi pernikahan adat. Jujuran diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah, biasanya dalam bentuk uang tunai dan barang-barang pelengkap seperti perlengkapan pribadi, perlengkapan rumah tangga, serta seserahan berupa perhiasan. Jumlah dan bentuk jujuran ditentukan melalui kesepakatan antara kedua keluarga dalam forum musyawarah yang dikenal sebagai *badatang*. Setelah disepakati, penyerahan jujuran dilakukan pada saat *maantar jujuran*.

Jujuran memiliki kedudukan yang penting dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Ia tidak hanya menjadi syarat adat, tetapi juga simbol penghormatan kepada pihak perempuan. Dalam prosesi adat, jujuran menandai keseriusan dan kesiapan laki-laki untuk menikah, serta kesanggupan ekonominya untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, proses *maantar jujuran* biasanya dilakukan secara resmi dan dihadiri keluarga besar, dengan tata upacara yang sarat nilai simbolik.

Selain penyerahan jujuran, tahapan pernikahan adat Banjar juga mencakup prosesi lain seperti *mantan patalian* (pertunangan), *bapingit* (masa pingitan), *batamat Qur'an* (pengujian bacaan Al-Qur'an), dan *badudus* (mandi adat). Seluruh prosesi tersebut menggambarkan bahwa pernikahan bukan hanya

urusan dua individu, tetapi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, jujuran menjadi bagian integral dari rangkaian budaya yang dijalankan turun-temurun.

Dalam pembahasan, Alfani Daud (2009) menyatakan bahwa masyarakat Banjar menjalankan pernikahan sebagai proses yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga adat dan spiritual. Tradisi jujuran menjadi salah satu bentuk pelaksanaan nilai adat yang mewujudkan penghormatan, kepatuhan terhadap norma, dan ikatan sosial antar keluarga. Oleh karena itu, jujuran tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan prosesi pernikahan adat Banjar.

Perbedaan antara jujuran dan mahar juga menjadi poin penting yang dijelaskan oleh masyarakat Banjar. Mahar merupakan syarat sah pernikahan secara agama dan menjadi hak mutlak istri, sedangkan jujuran merupakan pemberian yang digunakan untuk membiayai pesta pernikahan serta perlengkapan awal rumah tangga. Hanifah et al. (2023) menjelaskan bahwa jujuran memiliki nilai fungsi yang lebih luas, termasuk menjaga kehormatan keluarga dan menegaskan kesanggupan pihak laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga.

Rifqi Akbari (2018) menambahkan bahwa jujuran dalam tradisi Banjar memiliki makna yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pemberian jujuran tidak bersifat tunggal, tetapi dilengkapi dengan seserahan lain seperti perlengkapan tidur, kosmetik, perhiasan, hingga makanan adat. Bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan ekspektasi keluarga perempuan.

Nilai-nilai jujuran juga mencerminkan struktur sosial masyarakat Banjar. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan, semakin besar nilai jujuran yang diminta. Oleh karena itu, jujuran bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga soal kesetaraan simbolik antara dua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan. Madaniah (2021) menyatakan bahwa dalam masyarakat Banjar, pemberian jujuran menjadi simbol kesetaraan dan alat pengukuh hubungan antar keluarga yang setara secara sosial.

Dalam realitasnya, pemberian jujuran juga menjadi arena kompromi antara kehormatan keluarga dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Oleh karena itu, negosiasi dalam badatang sering kali dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan kemampuan, pihak keluarga perempuan dapat memilih untuk membatalkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa jujuran memiliki kekuatan sosial yang nyata dalam menjaga marwah keluarga.

Menurut Hanifah et al. (2023), masyarakat Banjar juga memaknai jujuran sebagai bentuk penguatan ikatan antara dua keluarga besar. Dalam banyak kasus, jujuran disampaikan secara terbuka di hadapan kerabat dan tetangga, sehingga menjadi ajang publik untuk menunjukkan komitmen sosial dan ekonomi calon mempelai laki-laki. Oleh sebab itu, proses maantar jujuran kerap dilaksanakan dengan prosesi yang cukup meriah dan formal.

Di sisi lain, apabila pihak laki-laki tidak membawa jujuran sesuai kesepakatan, hal ini bisa menimbulkan konflik sosial. Dalam beberapa kasus, prosesi pertunangan dibatalkan karena keluarga perempuan merasa tidak dihormati atau bahkan dipermalukan di hadapan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jujuran bukan hanya simbolik, tetapi juga membawa dampak langsung terhadap keberlanjutan hubungan antar keluarga.

Dari seluruh rangkaian temuan dan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jujuran dalam pernikahan adat Banjar merupakan praktik budaya yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan simbolik. Ia berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap pernikahan, tetapi juga sebagai cermin dari identitas budaya masyarakat Banjar dan strategi sosial keluarga dalam mempertahankan kehormatan serta status mereka dalam komunitas.

Pengaruh Status Sosial terhadap Nilai Jujuran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi besarnya jujuran dalam masyarakat Banjar di Kota Samarinda. Dalam proses penentuan jujuran, pihak keluarga perempuan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, kecantikan calon pengantin, serta latar belakang keluarga. Semakin tinggi posisi sosial calon mempelai perempuan, maka semakin tinggi pula nilai jujuran yang diminta oleh pihak keluarga. Hal ini tidak hanya menjadi kebiasaan turun-temurun, tetapi juga telah menjadi kesepakatan sosial yang dipegang kuat dalam komunitas Banjar.

Peneliti menemukan bahwa dalam musyawarah penentuan jujuran, pihak laki-laki dan perempuan akan saling menyampaikan keinginan dan kemampuannya. Namun demikian, penentu utama dari nilai jujuran tetap berada pada keluarga perempuan, dengan alasan menjaga nama baik dan kehormatan keluarga di hadapan masyarakat. Dalam beberapa kasus, negosiasi berjalan alot karena pihak perempuan menginginkan nilai jujuran yang sepadan dengan status sosial keluarga mereka. Bila tidak tercapai kesepakatan, prosesi pernikahan bisa dibatalkan meskipun sudah terjadi tukar cincin sebelumnya.

Dalam masyarakat Banjar, status sosial dipahami sebagai bentuk kehormatan dan citra yang dijaga oleh keluarga besar. Soekanto (2009) menjelaskan bahwa status sosial mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat, termasuk hak, kewajiban, serta prestise sosial yang menyertainya. Dalam konteks pernikahan, status ini tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada keluarga besar tempat calon mempelai berasal. Oleh karena itu, permintaan jujuran yang tinggi dianggap sebagai cara menjaga agar status tersebut tetap dihormati oleh masyarakat sekitar.

Pembahasan ini sejalan dengan pendapat Rifqi Akbari (2018) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kecantikan, dan kedudukan sosial orang tua calon pengantin sangat berpengaruh terhadap besaran jujuran. Dalam praktik adat Banjar, besarnya jujuran menjadi representasi dari nilai diri dan simbol kehormatan keluarga. Permintaan jujuran yang tinggi

dianggap wajar selama mencerminkan status sosial yang dimiliki pihak perempuan, dan jika dipenuhi, akan memperkuat posisi sosial kedua keluarga.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Madaniah (2021), bahwa jujuran tidak hanya bermakna sebagai pemberian, tetapi juga sebagai simbol kesetaraan status sosial antara kedua keluarga. Pemberian jujuran yang tinggi menjadi cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari kesan bahwa salah satu pihak lebih rendah dari yang lain. Oleh sebab itu, tradisi ini bukan hanya menyangkut aspek material, tetapi juga mencerminkan struktur sosial masyarakat Banjar secara lebih luas.

Dalam prosesnya, status sosial juga menjadi acuan untuk menentukan bentuk barang-barang seserahan yang menyertai jujuran. Keluarga dengan status tinggi akan mempersiapkan seserahan yang lebih mewah dan lengkap, mulai dari perhiasan, perlengkapan tidur, hingga kosmetik dan perlengkapan dapur. Hal ini menunjukkan bahwa jujuran telah menjadi sarana untuk menunjukkan kesiapan ekonomi dan kualitas sosial pihak laki-laki. Bagi masyarakat Banjar, hal tersebut merupakan bukti bahwa calon suami memiliki kapabilitas untuk menopang kehidupan rumah tangga yang layak.

Hanifah et al. (2023) memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa besarnya jujuran mencerminkan sejauh mana masyarakat menilai keberhasilan keluarga mempelai laki-laki dalam memenuhi ekspektasi sosial. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan prosesi jujuran akan menambah kehormatan keluarga di mata publik. Sebaliknya, nilai jujuran yang rendah dapat menimbulkan kesan bahwa pihak laki-laki tidak menghargai keluarga perempuan, dan hal tersebut berpotensi menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan sekitar.

Fakta lain yang ditemukan dalam penelitian adalah bahwa proses penentuan jujuran sering kali tidak melibatkan calon pengantin secara langsung, melainkan menjadi keputusan penuh dari orang tua dan keluarga besar. Hal ini memperlihatkan bahwa pernikahan adat Banjar bukan sekadar urusan pribadi, tetapi merupakan agenda sosial yang melibatkan kehormatan dan reputasi kolektif keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam menentukan jumlah jujuran bertujuan untuk menjaga posisi sosial dan menghindari celaan dari masyarakat.

Konsekuensi sosial dari rendahnya jujuran juga nyata dalam praktiknya. Dalam beberapa kasus yang ditemukan peneliti, terjadi pembatalan prosesi lamaran karena pihak laki-laki tidak membawa jujuran sesuai kesepakatan. Hal ini menyebabkan pihak perempuan merasa dipermalukan karena acara telah disaksikan banyak tamu. Dalam budaya Banjar, hal semacam itu dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga, sehingga pembatalan dianggap sebagai tindakan yang perlu diambil untuk menjaga marwah.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa status sosial memainkan peranan penting dalam menentukan nilai jujuran dalam pernikahan adat Banjar. Besarnya jujuran tidak hanya menjadi bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan, tetapi juga sarana mempertegas posisi sosial keluarga di tengah

masyarakat. Oleh karena itu, jujuran dalam konteks masyarakat Banjar adalah representasi dari kombinasi antara simbol budaya, pengakuan sosial, dan strategi kehormatan yang dijalankan dalam kerangka nilai-nilai adat yang masih dijaga hingga kini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi jujuran memiliki peran sentral dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Banjar di Kota Samarinda. Jujuran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian simbolik dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga merupakan representasi dari penghormatan terhadap nilai adat, kontribusi dalam pembiayaan pernikahan, serta sarana memperkuat relasi antar keluarga besar. Tradisi ini dijalankan melalui tahapan adat yang ketat dan sarat makna sosial, seperti prosesi badatang, maantar jujuran, bapingit, dan batamat Qur'an, yang semuanya menunjukkan betapa pernikahan dalam masyarakat Banjar dipandang sebagai peristiwa sosial yang melibatkan nilai spiritual, budaya, dan kehormatan keluarga.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya jujuran yang diberikan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kecantikan calon mempelai, serta latar belakang keluarga menjadi tolok ukur dalam menentukan nilai jujuran. Proses musyawarah dalam penentuan jujuran sering kali dijalankan oleh keluarga inti tanpa keterlibatan langsung dari calon mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Banjar tidak semata-mata urusan individu, melainkan strategi sosial yang dijalankan untuk menjaga kehormatan dan kesetaraan status antar keluarga. Dalam kasus tertentu, ketidaksesuaian jujuran dapat memicu pembatalan pertunangan sebagai bentuk perlindungan terhadap harga diri keluarga perempuan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bahwa tradisi jujuran bukan sekadar simbol dalam upacara pernikahan, melainkan instrumen sosial yang digunakan masyarakat Banjar untuk menjaga struktur, nilai, dan identitas budayanya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini perlu diiringi dengan pemahaman yang proporsional agar tidak menjadi beban atau sumber konflik antar pihak. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara menjaga nilai-nilai adat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana transformasi nilai jujuran berlangsung dalam konteks modern, termasuk perbedaan praktik antara masyarakat kota dan desa.

Daftar Pustaka

Akbari, R. A. 2018. *Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, A. H. 2000. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanifah, H., Hasanah, S., & Ulya, H. 2023. *Tingginya Harga Jujuran dalam Pernikahan di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Yayasan Mashahatul Ummah Ilal Jannah.
- Madaniah, H. 2021. *Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*. Palangka Raya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Rifqi, R. A. 2018. *Jujuran dalam Adat Banjar*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sanawiah, S., & Rismanto, I. R. 2021. *Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1): 52–63. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers